

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainnudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*. Vol. 1. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT Hanindita Omfet, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* . Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Azmi. *Kedaulatan Rakyat dan Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan*. *Al-Qalami: Jurnal Kajian Keislaman* (2017).
- Cirebon, Pemerintah Kabupaten. *Geografis*.
<https://www.cirebonkab.go.id/pages/2022/geografis>.
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-30*. By Q.S Asy Syura (26) Ayat 38. Semarang : PT. Kumudasmoro Grfindo, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.
- Fauzan, Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Kelompok Intra Publishing, 2016.
- Frenky. "Asas-asas dalam Pemilihan Umum di Indonesia menurut Fiqih Siyasah." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8 (2017).
- Grinin, Leonid E. *The Early State*. 44. Boston: Bedford, 2007.
- Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Hulu, Dermawan Harefa dan Fatolosa. *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. Banyumas: Embrio Publisher, 2020.
- Iqbal, Muhammada. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jurdi, Fajlurahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.

- Librayanto, Romi. *Ilmu Negara, Suatu Pengantar*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2009.
- Lili Rasjidi dan B. Arif Sidharta. *Filsafat Hukum, Mazhab Dan Refleksinya*. Bandung: Remadja Karya, 1989
- M, Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2009.
- M, Sri Soemantri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Maftuh, Muhammad Aziz. "Parliamentary Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 (Tinjauan Yuridis Asas Kedaulatan Rakyat)." *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2020.
- Manan, Bagir. 2. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Mannan, Husnul. "Analisa UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya." *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020.
- Marzuki. *Metedologi Riset*. Yogyakarta : PT Hanindita Omfet, 2001.
- MD, Moh Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka, 2003.
- Moeleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moertopo, Ali. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020.
- Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS, 1947.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Saragih, Moh Koesnardi dan Bintang R. *Ilmu Negara*. Jakarta: Perintis Press, 1985.
- Sheehan, James J. *The Problem of Sovereignty; the American History*. Oxford: Oxford University, 2006.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Surbakti, Ramlan. *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan , 2008.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Tamanaha, Brian Z. *On The Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University, 2024.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (6) tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-Tiap Penduduk untuk Memeluk Agamanya Masing-Masing dan Untuk Beribadat menurut Agamanya dan Kepercayaan itu.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 40 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Valery, Tody. "Analisis Yuridis Sistem Proporsional Terbuka dalam Sitem Pemilihan Umum di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 ." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2023.

Interview by Rully Rahman. (Maret Senin, 2024).

Interview by Ruliyanto. (Maret Senin, 2024).

Yudi Widagdo dan Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara*. Bangkalan: Embrio Publisher, 2013.

